

Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dengan Program Bedah Rumah di Kota Jambi

Jevi Saputra

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, jevisaputra@uinjambi.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the government is alleviating poverty in Indonesia through various methods that are continuously used to reduce poverty, one of which is the provision of various social assistance to the community through a house renovation program. In renovation the house Program is an activity carried out in the context of renovating uninhabitable houses, namely residential buildings that do not meet sanitation, safety and social requirements. The purpose of this study is to analyze: 1) the welfare of the community after receiving housing repair assistance. 2) The house renovation program has an impact on reducing poverty in the city of Jambi. This study uses a qualitative approach using the qualitative data analysis method of the Miles and Huberman model. The data used is primary data with data collection methods through interviews, observation and document studies. Respondents who were interviewed were interviewed using the purposeful sampling method. The results of this study indicate that; (1) home renovation reduces the number of poor people, (2) home renovation effectively increases wealth.

Keyword: *home renovation program, poverty alleviation.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan momok yang menakutkan bagi negara berkembang, bahkan negara maju. Terkadang kemiskinan suatu negara menjadi tolok ukur bagaimana suatu negara mendaul ulang sumber dayanya dan bersaing dengan negara lain dalam hal ekonomi. Kondisi kemiskinan suatu Negara atau daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada suatu Negara atau Daerah tersebut (Christianto, 2013). Banyak faktor penyebab kemiskinan, yaitu: rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, malas bekerja, sulitnya kehidupan keluarga, terbatasnya sumber daya (modal) dan multidimensi. Negara berkembang seperti Indonesia tentunya tidak lepas dari masalah kemiskinan yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Menurut Badan Pusat Statistik (2021), Indonesia dapat mengurangi jumlah penduduk miskin setiap tahunnya, namun pada tahun 2021 untuk Kota Jambi sekitar 54,23 juta jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan yaitu sebesar 9,02%. Untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah kemudian memberikan subsidi atau hibah untuk berbagai rumah khususnya di kota jambi yang menjadi perhatian salah satu kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dibawah UMP.

Kondisi serba kekurangan menyebabkan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak karena alasan ekonomi. Salah satu dasar kebutuhan Primer yaitu berupa papan yang menjadi fokus tempat bernaung suatu keluarga dalam menjalankan hidup sehari-hari. Karena dengan adanya rumah maka tingkat hidup akan bisa lebih baik. Tingkat kesehatan lebih baik, tingkat pendidikan lebih baik dengan begitu produktifitas meningkat.

Pemerintah terus melaksanakan program bedah rumah yang tidak layak huni. Program yang awalnya dicetuskan pertama kali di kabupaten Sarolangun pada tahun 2008 dengan program serjusade berhasil membangun rumah tidak layak huni sebanyak 100 unit setiap kecamatan. kemudian diadopsi oleh pemerintah pusat dengan berbagai macam Program seperti Program P2KP. Program PPK (Program Pengembangan Kecamatan). Program Dana Desa. Program BSPS dari kementerian PUPR. Dan Program Bedah Rumah Madani dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Program Bedah Rumah ini diprioritaskan bagi masyarakat yang memenuhi syarat antara lain masuk dalam daftar RTS (Rumah Tangga Sasaran). Penerima PKH. Bansos BLT. BST. Bantuan Pangan Non tunai BPNT (Widayanti, 2016).

Seperti Program stimulan perumahan swadaya ini dilaksanakan sebelum pandemi pada 2019 dimana pemerintah memberi bantuan sebagai stimulan pembelian bahan bangunan setiap orang akan mendapat bantuan 17 s/d 20 juta bahkan ada mendapat bantuan sampai 50 juta per unit kepala keluarga yang rumah yang siap huni. Dimana dari rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. (Budiharjo, 2019). Program stimulan perumahan swadaya berguna meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman. melalui dana APBN. melalui dana alokasi APBD pemerintah kota jambi kembali melaksanakan Program Bedah Rumah pada tahun 2022. Secara garis besar seharunya program bedah rumah bisa dijadikan sarana efektif bagi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan merupakan kondisi yang serba terbatas yang terjadi bukan kehendak dari seorang manusia menurut Kunarjo dalam Barul Munir (2002:10). Sehingga seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarga yang mencakup kebutuhan fisik, mental dan social. Kadang kemiskinan dipandang ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang ukur dari segi pengeluaran (BPS).

Menurut Atalay (2015). Kemiskinan sudah menjadi problem dalam setiap Negara. Karena dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi yang menjadi indicator dalam mengatasi masalah kemiskinan. Karena pertumbuhan ekonomi merupakan konsep dari pembangunan ekonomi. Cremin & Nakabugo (2012) menyatakan berbagai macam studi empiris yang telah ada menunjukan bahwa harapan pembangunan ekonomi adalah membawa perbaikan ekonomi. Seperti pengentasan kemiskinan. Standar pendidikan lebih baik. Atau perbaikan kesehatan. Karena kesehatan dan pendidikan merupakan investasi yang dapat menunjang seseorang dalam berpikir untuk memperbaiki ekonomi mereka.

Agar kemiskinan tidak semakin parah. Maka pemerintah harus meletakan kemiskinan menjadi pusat perhatian atau prioritas penting yang tidak bisa diabaikan. Penanggulangan kemiskinan yang paling jitu adalah menyediakan aktivitas ekonomi guna menciptakan pertumbuhan ekonomi menurut Yacoub (2012).

Penelitian (Sari Wulandari et al, 2022) mengatakan cara menengulangi kemiskinan itu bisa di bedakan menjadi dua. Yang pertama kebijakan tidak langsung diaarahkan padapenciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan seperti suasana sosial politik, kedua kebijakan langsung diarahkan kepada peningkatan sumber daya manusia, khususnya masyarakat yang berpendapatan rendah dengan upaya menyediakan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan hingga pendidikan.

Sedangkan menurut Lincoln Arsyad (2000) ada 4 stretegi kebijakan yang harus pemerintah jalankan untuk memperbaiki tarap hidup masyarakat miskin. pertama dengan strategi pengembangan Fisik untuk menciptakan identitas perkotaan dengan memperbaiki kualitas hidup. Kedua pengembangan dunia usaha. Bagaimana pemerintah memberi bantuan dalam bentuk permodalan usaha. Ketiga pengembangan sumber daya dengan cara memberi bantuan pelatihan. Keempat pengembangan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui sebuah kelompok dengan tujuan menciptakan manfaat social.

Osborne dan Plastrik (2000;55) menyatakan Pemerintah merupakan lembaga yang besar, kompleks dan ruwet. Desa merupakan potensi yang strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggara otonomi daerah. Untuk menunjang keberhasilan dalam upaya pemerintah mengurangi dan membantu masyarakat miskin. Program bedah rumah dari pemerintah merupakan bagian pembangunan nasional. Dimana tujuan pembangunan nasional suatu proses terus menerus dan berkesinambungan menurut Afifudin (2012).

Berbagai program dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, (Remi & Tjiptoherijanto, 2002) menjelaskan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tergantung pada kelompok sasaran dan daerah mana yang ditargetnya, misalnya siapa dan dimana mereka tinggal. Hal ini sejalan dengan (Todaro & Smith, 2015) yang menuliskan bahwa diperlukan lebih banyak pengetahuan tentang siapa yang termasuk golongan miskin dan apa karakteristik ekonomi mereka sebelum merumuskan program dan kebijakan yang efektif untuk memerangi kemiskinan.

Menurut (Bappenas, 2007) program penanggulanan kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama mencakup program-program yang ditujukan khusus untuk kaum miskin. Jika program-program ini dilaksanakan secara efektif, keluarga miskin dalam kelompok ini akan sangat diuntungkan. Contoh programnya antara lain bantuan beras untuk masyarakat miskin, bantuan langsung tunai, dan jaminan kesehatan. Sedangkan kelompok kedua tidak hanya masyarakat miskin yang menerima tapi juga masyarakat dari semua golongan pendapatan. Contoh program ini antara lain pengurangan biaya sekolah, penyediaan pendanaan pelayanan kesehatan dan Bantuan tempat tinggal yang layak.

Kemudian Noor Zuhdiyanty (2017) mengatakan program bedah rumah dikatakan berhasil dalam mengurangi kemiskinan apabila indek pertumbuhan masyarakat miskin turun setiap tahunnya.

Livender, C. Dkk (2020) dalam penelitiannya mengatakan tujuan dari Program Bedah Rumah ini tentu agar supaya membuat masyarakat yang kurang mampu, bisa mendapatkan kesejahteraan, dimana masyarakat yang kurang mampu bisa memperoleh hidup yang layak dan

nyaman. Program Bedah Rumah ini terjadi dikarenakan pemerintah pemerataan pembangunan.

Suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan meningkatkan infrastruktur dalam penanganan pemukiman. Menurut Prayogi (2013) dalam penelitiannya program bedah rumah merupakan wujud program yang berorientasi masyarakat miskin yang diperuntukan bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni. Ini merupakan salah satu aspek penting yang melekat pada pemerintah, pemerintah dalam tugasnya harus mampu mengeluarkan produk kebijakan dalam pelayan terhadap masyarakat. Sehingga implementasi sederhana yang bersentuhan dengan masyarakat dapat dapat bermanfaat.

Sehingga Program bedah rumah menjadi salah satu produk kebijakan yang bisa membantu masyarakat. program yang ditujukan untuk merahabilitasi atau memperbaiki rumah masyarakat miskin yang tidak layak huni. Program bedah rumah merupakan salah satu program dari pemerintah dalam upaya untuk memberikan perlindungan pada keluarga miskin guna meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dimana proses penelitian dan pemahaman yang didasari penyelidikan terhadap fenomena social dan masalah manusia. Peneliti membuat gambaran yang kompleks, meneiliti pendapat. Laporan rinci dari pandangan responden, dan melakukan studi yang alami (Creswel, 1998:15). Sehingga mendapatkan data yang akurat. Data merupakan hal mutlak yang digunakan dalam mengumpulkan informasi. Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak direpresentasikan sebagai angka, dan cara membaca data tersebut, mendeskripsikannya secara detail dan jelas sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan mudah.

Sumber data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder adalah dokumen yang diperoleh dari instansi pemerintah yang memiliki program yang dapat dipublikasikan. yang diperoleh langsung didapat dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei. biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Indriantoro dan Supomo dalam Purhantara (2010:79).

Kemudian Pengumpulan data yang merupakan proses memperoleh data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah. Sebagai aturan, data yang dikumpulkan akan digunakan, selain untuk tujuan penelitian, juga untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Moehar, 2002: 131) Untuk itu, penulis terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan atau observasi. Wawancara dan dokumentasi.

Bagian terakhir adalah Analisis data yang bertujuan untuk mengontrol data secara sistematis. dan. sesuai. dengan. rumusan. masalah. Dalam. penelitian. ini, penulis menggunakan analisis. data. induktif. yaitu. analisis. diawali. dengan. wawancara, diskusi, bukti pendukung dan diakhiri. dengan. kesimpulan. Untuk. menjaga keabsahan. data. dalam. metode. penelitian. kualitatif, penulis. menggunakan metode. triangulasi. sumber. Triangulasi.

sumber dilakukan. dengan membandingkan berbagai sumber informasi yang menjadi objek penelitian. (Lawrence, 2013:187). Penelitian ini melibatkan subjek yang berada di kota Jambi dengan sampel dari beberapa Kelurahan dan kecamatan yang ada di kota Jambi. Penentuan lokasi pada penelitian ini dipilih secara sengaja (purpose) sebagai syarat dan tujuan penelitian. Pemilihan lokasi di Kota Jambi dikarenakan Kota Jambi merupakan pusat kota Provinsi Jambi yang masyarakat miskinnya seringkali tidak terdaftar oleh pihak terkait.

Dalam penelitian ini kepala dinas merupakan sumber informasi. Masyarakat yang menerima bantuan program bedah rumah. Berbagai kelompok informan digunakan di sini: mereka yang menjalankan program dan mereka yang menerima program perbaikan rumah. Peneliti mendapatkan data renovasi rumah dari RT setempat yang membidangi program bantuan pemerintah. Setelah itu peneliti melakukan pengecekan data dengan hasil wawancara mendalam yang didapatkan dari informan yaitu 25 orang informan dari 1 orang dari kantor BPS Kota Jambi (staf pengolah data), 2 orang dari kantor Perkim (Kadis dan Kabis), 3 orang dari Kantor Kecamatan (Camat dan Staf). 2 orang dari kelurahan, 3 ketua RT dan 1 orang dari masing-masing RT yang menerima Program Bedah Rumah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar masalah yang kita lihat dalam penyebab kemiskinan dapat diidentifikasi sebagai kemiskinan, yang kita kenal sebagai kemiskinan subjektif, kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan alami, kemiskinan budaya dan kemiskinan struktural. 1. Kemiskinan subjektif adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kenyataan bahwa seseorang percaya bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi. 2. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang disebabkan karena pendapatan seseorang atau keluarga di bawah standar yang ditetapkan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua sektor masyarakat, sehingga pengangguran dan kesempatan kerja tidak seimbang. 3. Kemiskinan alami adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam di sekitar tempat tinggalnya. 4. Kemiskinan budaya adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat, yang tidak ingin meningkatkan taraf hidup seperti masyarakat modern. 5. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sekelompok orang yang tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia.

Definisi dan Indikator Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar karena aspek kemiskinan ini terkait langsung atau tidak langsung, yang berarti bahwa kemajuan atau kegagalan satu aspek mempengaruhi aspek lainnya. Ketiga, kemiskinan sangat erat kaitannya dengan pedesaan, dsb. Pada hakekatnya adalah penduduk atau orang-orang yang mengalami kemiskinan. Secara umum ciri-ciri kemiskinan adalah sebagai berikut: pertama, mereka tidak memiliki faktor produksi sehingga peluang untuk memperoleh pendapatan terbatas. Kedua, dia tidak memiliki kemungkinan untuk mendapatkan aset produksinya sendiri. Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan karena mencari nafkah di usia muda. Keempat, sebagian besar tinggal di pedesaan. Kelima, mereka yang tinggal di kota masih muda dan kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan.

Untuk mencari solusi masalah kemiskinan, penting bagi kita untuk mempelajari indikator kemiskinan secara detail. Indikator kemiskinan yang dikutip oleh Badan Pusat Statistik antara lain sebagai berikut: Pertama, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar konsumen (sandang, pangan dan papan). Kedua, tidak ada akses terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi). Ketiga, kurangnya jaminan masa depan (karena tidak ada investasi dalam pendidikan dan keluarga), dan keempat, kerentanan terhadap guncangan, baik individu maupun massa. Kelima, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terbatas. Keenam, kurangnya evaluasi dalam kegiatan sosial.

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Berikut adalah faktor-faktor penyebab kemiskinan:

- a. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingginya angka kelahiran di kabupaten tersebut dapat menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan penduduk negara tersebut. Dengan demikian, hal ini dapat mengakibatkan lapangan pekerjaan yang tersedia dibatasi oleh kemampuan untuk mempekerjakan orang yang membutuhkan pekerjaan.
- b. Masyarakat pengangguran semakin berkembang. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan terbatasnya lapangan kerja di negara tersebut. Dengan demikian, angka pengangguran di kabupaten tersebut akan meningkat, sehingga angka kemiskinan juga akan meningkat.
- c. Pendidikan rendah. Individu dengan tingkat pendidikan yang rendah umumnya tidak memiliki keterampilan, wawasan atau pengetahuan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal inilah yang membuat masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah menjadi kurang kompetitif dan berujung pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.
- d. Ada bencana alam. Bencana alam bisa menjadi faktor penyebab kemiskinan yang tak terhindarkan. Bencana alam dapat menjadi penyebab kemiskinan karena masyarakat yang terkena bencana akan kehilangan harta bendanya.
- e. Distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menimbulkan pola kepemilikan yang tidak seimbang Masyarakat dengan sumber daya yang terbatas dan rendah cenderung hidup di bawah garis kemiskinan Pengangguran

Kemiskinan di Kota Jambi

Salah satu syarat penting agar kebijakan anti kemiskinan dapat tercapai adalah adanya kejelasan kriteria siapa atau kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin dan yang menjadi sasaran program itu sendiri di setiap komunitas dan wilayah/daerah. Karena alasan tersebut tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai lokal yang melingkupi kehidupan masyarakat. Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya angka pengangguran dan keterbelakangan. Orang miskin cenderung lemah dalam kemampuan berusaha dan memiliki akses yang terbatas terhadap kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari orang lain yang lebih potensial. Ukuran kemiskinan, dilihat dari tingkat pendapatan, dapat dibagi menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dianggap benar-benar miskin.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi meningkat 16,06% dari 277,80 juta orang pada Oktober 2020 menjadi 293,86 juta orang. Indikator ini meningkat tahun lalu dibandingkan September 2021 sebesar 16,06%. Tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jambi khususnya di Kota Jambi terkait dengan pandemi Covid-19. Pada September 2021, penduduk miskin Kota Jambi sebesar 9,02%, meningkat 0,75% dari September 2020 yang sebesar 8,27%. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat sebesar 0,48% dari 7,78%. Angka kemiskinan tertinggi sebesar 10,95% berada di Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Persentase terendah terdapat di kota Kali Penuh, yaitu 3,03% dan 3,83% di Muaro Jambi. Dengan demikian, seseorang dapat melihat bahwa kemiskinan di beberapa wilayah perkotaan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi pada daerah yang dekat dengan pusat kota dibandingkan dengan daerah yang lebih terpencil, dimana indeks kedalaman kemiskinan di Kota Jambi mencapai 0,05% dan tingkat keparahan kemiskinan di Kota Jambi mencapai 0,06%, per tahun. Dapat diartikan kemiskinan meningkat di kota Jambi.

Program Bedah Rumah Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Kota Jambi

Osborne. dan Plastrick (2000; 55) Pemerintah. adalah. institusi. yang besar, kompleks. dan. rumit. Desa. memiliki. potensi. yang. sangat strategis, sehingga. diperlukan. perhatian. yang. seksama. terhadap terwujudnya. otonomi. desa. dalam. mendukung. keberhasilan pemerintah, maka. upaya yang. harus dilakukan oleh pemerintah yaitu penguatan desa merupakan langkah yang benar-benar. harus. dilakukan oleh. pemerintah. provinsi. dan. pemerintah. daerah. Sebagai. kepala desa, beliau dipercayakan. dengan. penyelenggaraan pemerintahan desa (UU No. 6 Tahun 2014), pelaksanaan pembangunan, pembangunan. desa dan. pemberdayaan. desa.

Sebagai bagian dari pemberdayaan desa banyak sekali program bedah rumah yang digalang oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan demi kesejahteraan. dan. pemerataan. pembangunan. melalui. dana. APBN kabupaten, provinsi. dan. pusat, pemerintah. provinsi. dan. pusat. perlu mengimplementasikan. 10. persen. dalam. APBD. masing-masing. untuk dana. desa. Selain itu ada juga bantuan dari BAZNAS untuk rakyat kurang mampu.

Persyaratan. Penerima. Manfaat Program. Bedah. Rumah. berdasarkan Peraturan Menteri. Pekerjaan. Umum dan. Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang. Bantuan. Insentif Bedah. Rumah. atau yang disebut Beda Ruma BAB. IV Pasal 13. adalah. sebagai berikut: Penerima BSPS Fisik adalah MBR yang memenuhi persyaratan:

- a. Warga. negara. Indonesia. yang. sudah. menikah.
- b. Kepemilikan. atau. penguasaan. tanah.
- c. Belum memiliki rumah atau memiliki dan. menempati satu. rumah dalam. kondisi. tidak. layak. huni.
- d. Tidak pernah menerima BPS dari pemerintah pusat.
- e. Penghasilan tidak lebih dari yang setara dengan upah minimum provinsi setempat.
- f. Prioritas diberikan kepada mereka yang mandiri. dan. berencana untuk. membangun. atau. meningkatkan. kualitas. rumahnya.

- g. Siap membuat grup dan
- h. Bersiaplah untuk membuat pernyataan.

Renovasi rumah merupakan bagian dari upaya pemerintah dan bagian dari pembangunan nasional dimana Tujuan Pembangunan Nasional merupakan proses yang berkesinambungan dan berkesinambungan (Afifudin, 2012).

SIMPULAN

Program bedah rumah yang dilaksanakan oleh BAZNAS, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara umum belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Meskipun program ini membantu rakyat miskin dengan kebutuhan dasar sehingga yang seharunya uang perbaikan rumah juga dapat digunakan untuk tujuan lain. Meskipun terlihat dari data yang diperoleh melalui kantor BPS angka pertumbuhan penduduk miskin semakin meningkat. Program Bedah Rumah juga harus menstimulasi keadaan yang sebenarnya. Masyarakat yang dapat itu benar-benar rakyat misskin. Sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam program ini Dinas PERKIM, Kecamatan, Kelurahan wajib melakukan survey dan turun untuk melihat keadaan, kondisi yang telah di data oleh RT setempat.

Yang perlu diperhatikan dalam program bedah rumah ini agar hasilnya bagus dan tidak mengecewakan, ada baiknya anggaran dari program bedah rumah ini diketahui oleh penerima bantuan dan masyarakat umum, dan pihak penyelenggara sebaiknya menyesuaikan anggaran digunakan sebagaimana mestinya. Sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat tentang anggaran yang digunakan dan hasil yang dilaksanakan.

Kriteria dan hak penerima manfaat program bedah rumah dan harus memiliki kriteria khusus yang diketahui masyarakat luas, serta ada sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara kepada masyarakat. Dan yang paling penting adalah adanya koordinasi yang baik dari pihak pemerintah selaku penyelenggara dan swadaya masyarakat yaitu Lurah, RT, agar program bedah rumah ini dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Okuputra MA dan Nasih, 2022, Dampak Inovasi Daerah terhadap Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, Volume 18
- Wulandari, Sari. Et al. 2022. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan 2022, Program Pengentasan Kemiskinan Negara Indonesia. *Jurnal Riset Inovasi*.
- Zuhdiyanti, Noor, 2017. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia selama lima tahun terakhir (studi kasus dari 33 provinsi). *Jebeka* Volume 11.
- Afifudin, 2012. *Pengantar Manajemen Pembangunan. Konsep. Teori dan Maknanya di Era Reformasi*. Bandung, Alfabet.
- Jopari, 2016. *Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Edisi Kesepuluh
- Erwan, A. P. 2002. Mengkaji potensi UMKM untuk pembuatan kebijakan anti kemiskinan di Indonesia, Volume 10 NO. 3 Maret 2007. *Jurnal ilmu social politik*

- Gunawan, I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)*. Miskin. Bumi Skrip
- Budihardjo, E. (2009). Perumahan dan permukiman di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Daly, A., & Fane, G. (2002). Anti-poverty programs in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 38(3), 309-329.
- Widayanti, Sri Yuni Murti dan Hidayatulloh. 2015. Kinerja Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Pengetasan Kemiskinan. *Jurnal PKS*. Vol 14 No 2 : 163- 180
- Maleong, L., J., 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- I Ged dan Ni Luh Karmani. 2018. Analisis dampak program bedah rumah terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kesmiskinan di kabupaten buleleng, Vol. 9. NO. 12 *E-Jurnal*.
- Yacoub, Y., 2012. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak , 8(3), pp.176-185.
- Atalay, R., 2015. Science Direct The education and the human capital to get rid of the middle-income trap and to provide the economic development. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 174, pp.969-976. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.720>.
- Cremin, P. & Nakabugo, M.G., 2012. Education, development and poverty reduction: A literature critique. *International Journal of Educational Development*, 32(4), pp.499-506. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2012.02.015>.
- Stoner.LJ dan Wankel, C. 2006. *Manajemen*, terjemahan. Jakarta. intermediat
- Widjaja, Haw, 2012. *Otonomi Desa*, Jakarta. PT Rajagrafindo Persada
- Peraturan Kementerian Pembangunan dan Perumahan Rakyat No. 17/PRT/M/2018 tentang Bantuan Insentif Bedah Rumah Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016 tentang Desa
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Insentif Rumah Swadaya Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 tentang UU Rehabilitasi Sosial Rumah Bukan Tempat Tinggal dan Sarana dan Prasarana Pelestarian Lingkungan No. 6 Tahun 2014 O Des.
- [BPS]. 2022. Jambikota.bps.go.id. Badan Pusat Statistik. Kota Jambi
- [BPS]. 2022. provinsijambi.bps.go.id, Badan Pusat Statistik. Provinsi Jambi